

Peran Administrasi dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tajungsari

¹Renita Anggi Anggraeni, ² Nina Oktarina

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

*Corresponding Author e-mail: renitaanggraeni5586@students.unnes.ac.id

Received: October 2025; Revised: Nopember 2024; Published: December 2025

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah instrumen vital bagi pengembangan ekonomi desa yang keberhasilannya tergantung pada manajemen administrasi yang baik. Penelitian terdahulu umumnya terfokus pada kinerja ekonomi dan keuangan makro, sehingga terdapat kesenjangan dalam pemahaman mendalam mengenai fondasi operasional BUMDes, yaitu sistem administrasi internal dan tata kelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran administrasi BUMDes Tajungsari, mengidentifikasi masalah, dan mengeksplorasi upaya peningkatannya. Metode kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara mendalam terhadap empat informan kunci (Kepala Desa, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). Temuan utama menunjukkan administrasi berperan kunci dalam pencatatan transaksi keempat unit usaha dan pelaporan berkala. Namun, tantangan utama yang ditemukan adalah keterbatasan SDM, risiko sistem manual, dan rendahnya literasi digital. Kebaruan penelitian (novelty) terletak pada analisis peran administrasi secara komprehensif pada BUMDes dengan multi unit usaha, serta mengevaluasi solusi berbasis tindakan yang sedang berjalan di lapangan. Upaya peningkatan dilakukan melalui kolaborasi intensif, studi banding, dan perencanaan digitalisasi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas administrasi BUMDes sangat penting untuk menciptakan manajemen yang profesional dan berkelanjutan.

Kata kunci: Administrasi; Tata Kelola; BUMDes; Desa Tajungsari;

The Role of Administration in the Governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Tajungsari Village

Abstract

Village-Owned Enterprise (BUMDes) is a vital instrument for rural economic development whose success depends on sound administrative management. Previous research generally focuses on macroeconomic performance and financial aspects, thus creating a research gap in understanding the deep operational foundation of BUMDes: its internal administrative system and governance. This study aims to analyze the role of administration in BUMDes Tajungsari, identify the problems, and explore strategies for improvement. A qualitative descriptive method was utilized through in-depth interviews with four key informants (Village Head, Chairman, Secretary, and Treasurer). The main findings demonstrate that administration plays a key role in transaction recording for all four business units and periodic reporting. However, the main challenges identified are limited human resources, the risk of manual systems, and low digital literacy. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis of the administrative role within a BUMDes with multi-business units, alongside the evaluation of action-based solutions currently implemented in the field. Improvement efforts include intensive collaboration, benchmarking studies, and digitalization planning. The study concludes that strengthening BUMDes administrative capacity is critical for achieving professional and sustainable management.

Keywords: Administration; Governance; BUMDes; Tajungsari Village

How to Cite: Anggraeni, R. A. ., & Oktarina, N. . (2025). Peran Administrasi dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tajungsari. Journal of Authentic Research, 4(2), 2027-2038. <https://doi.org/10.36312/25qvgz12>



<https://doi.org/10.36312/25qvgz12>

Copyright© 2025, Anggraeni at al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang bergerak di bidang ekonomi di desa, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memberdayakan masyarakat melalui usaha yang didasarkan pada potensi lokal. Dengan adanya BUMDes, maka desa mempunyai 2 (dua) kemampuan, yaitu yang pertama adalah kemampuan finansial dan yang kedua adalah kemampuan sosial sehingga mampu untuk mengelola unit-unit usaha BUMDes secara inovatif dan teknik lainnya agar dapat menghasilkan keuntungan baik secara finansial maupun sosial bagi masyarakat desa tersebut (Fatimah, 2021). Tata kelola administrasi publik yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat, keterbukaan informasi, dan keberlanjutan, serta didukung oleh kepatuhan pada aturan hukum sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan efektif. (Tri Widyawati Rahayuningsih et al., 2024). BUMDes memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemajuan desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat berfungsi dengan baik, BUMDes membutuhkan pengelolaan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Administrasi merupakan salah satu aspek kunci dalam pengelolaan ini karena berfungsi sebagai dasar untuk pencatatan, pelaporan, dan pengawasan. Pengelolaan administrasi yang baik tidak hanya membantu menjaga keteraturan organisasi, tetapi juga menjadi ukuran untuk transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya memperkuat pengambilan keputusan yang tepat. Aspek ini diperkuat oleh temuan literatur yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) memiliki peran signifikan terhadap peningkatan kinerja di Badan Usaha Milik Desa (Sofyani et al., 2020). Untuk mengoperasikan semua prinsip tata kelola tersebut, administrasi harus mencakup kerangka kerja yang komprehensif. Menurut Safitri et al., (2023) pengelolaan administrasi mencakup fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Fungsi-fungsi tersebut harus diterapkan secara terpadu agar BUMDes dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Setiap desa umumnya memiliki produk unggulan yang menjadi ciri khas sekaligus penggerak ekonomi lokal. Produk unggulan desa bisa berupa hasil lokal yang memiliki nilai tambah dan keunggulan, seperti produk pertanian organik, kerajinan tradisional, makanan khas, atau wisata berbasis budaya. Produk-produk ini tidak hanya mencerminkan identitas budaya dan kearifan lokal, tetapi juga berkaitan erat dengan potensi sumber daya manusia (SDM) di desa. SDM yang terampil dan berpengetahuan dalam bidang pertanian, kerajinan, kuliner, atau wisata budaya dapat berperan penting dalam pengembangan produk unggulan desa. Seperti yang diungkapkan oleh (Ayu et al., 2022) potensi SDM di Desa Sidomulyo, contohnya, menjadi aset berharga karena masyarakatnya dikenal giat dalam bekerja, baik sebagai petani, pengrajin, maupun pelaku usaha lokal.

Fenomena tersebut juga relevan dengan Desa Tajungsari, di mana potensi lokal dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan unit usaha yang bergerak pada bidang persewaan alat bangunan, pengelolaan pariwisata, layanan wifi desa, hingga penyediaan air bersih, BUMDes Tajungsari berupaya memanfaatkan potensi SDM dan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pengelolaan potensi ini tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sistem administrasi yang baik sebagai fondasi tata kelola BUMDes.

Desa Tajungsari yang terletak di Kabupaten Pati memiliki BUMDes yang menjalankan beberapa unit usaha aktif, seperti penyewaan alat bangunan, pengelolaan tempat wisata, layanan wifi untuk desa, serta penyediaan air bersih melalui program PAMSIMAS. Usaha-usaha ini telah memberikan dampak positif bagi PADes dan juga mendorong kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, pengelolaan administrasi BUMDes Tajungsari masih mengalami beberapa masalah, terutama terkait dengan kurangnya sumber daya manusia, sistem pencatatan yang masih manual, dan kesulitan dalam menggunakan aplikasi digital. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, hambatan utama dalam pelaksanaan administrasi terletak pada keterbatasan jumlah tenaga kerja, fasilitas, dan konsistensi dalam pencatatan. Situasi ini sejalan dengan studi yang menjelaskan bahwa salah satu rintangan terbesar dalam manajemen BUMDes di zaman sekarang adalah lemahnya strategi pengelolaan sumber daya manusia dalam menghadapi tuntutan transformasi digitalisasi (Rosari et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa kemampuan dan ketrampilan SDM merupakan faktor krusial dalam menentukan mutu administrasi BUMDes. Oleh sebab itu, pengembangan kapasitas aparatur dan pengurus BUMDes sangat diperlukan agar pengelolaan dapat berjalan dengan lebih profesional dan responsif terhadap perubahan teknologi.

Kepala Desa menyatakan bahwa sistem manual ini memiliki risiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan, keterlambatan dalam pelaporan, bahkan kehilangan data yang penting, yang merupakan ancaman bagi kelangsungan unit usaha yang sudah berhasil. Keadaan ini menunjukkan bahwa sistem administrasi manual sudah tidak sesuai dengan tuntutan pengelolaan organisasi desa yang memerlukan efisiensi dan keakuratan data. Situasi administrasi yang rentan ini sangat kontradiktif dengan praktik tata kelola yang ideal. Penelitian terbaru menekankan bahwa transformasi dalam tata kelola BUMDes di era digital merupakan aspek fundamental untuk keberlanjutan serta profesionalisme, terutama dalam mendukung pengembangan bisnis yang lebih besar (Wardana et al., 2022; Wulandari & Lestari, 2024). Oleh karena itu, penerapan digitalisasi dalam administrasi bukan hanya sebuah inovasi teknis, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan daya saing BUMDes di era modern.

Meskipun peran BUMDes telah banyak diteliti, sebagian besar studi sebelumnya lebih terfokus pada aspek ekonomi, dampak sosial, atau pengelolaan keuangan makro. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti digitalisasi laporan keuangan (Yuliani et al., 2021) atau model ideal tata kelola BUMDes (Hirman et al., 2023), penelitian ini mengatasi kekurangan dengan mengeksplorasi peran administrasi secara menyeluruh pada BUMDes yang mengelola empat unit usaha sekaligus serta menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia, sistem manual, dan penyesuaian teknologi. Keunikan dari penelitian ini terletak pada analisis empiris yang berbasis tindakan, yang menggambarkan proses aktual koordinasi, pendampingan, dan rencana digitalisasi sebagai solusi berbasis partisipasi internal terhadap permasalahan administratif dan sumber daya manusia.

Pendekatan yang berbasis tindakan ini sejalan dengan penelitian yang menyoroti betapa pentingnya tata kelola yang efektif melalui digitalisasi dan

penyatuan laporan keuangan sebagai solusi yang praktis (Aprillianto et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang spesifik bagi literatur tentang tata kelola BUMDes.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diadakan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu bagaimana administrasi berperan dalam membantu pengelolaan BUMDes di Desa Tajungsari, apa saja masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi, dan bagaimana cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas administrasi dalam pengelolaan BUMDes.

Lingkup penelitian ini berfokus pada tiga indikator utama dari peran administrasi yang berkaitan dengan praktik harian BUMDes, yakni pencatatan keuangan, penyimpanan berkas, serta pelaporan rutin. Ini sejalan dengan kajian yang mengkaji akuntabilitas melalui laporan keuangan BUMDes (Ana & Ga, 2021). Pembatasan variabel isu yang diteliti meliputi aspek sumber daya manusia, sistem operasi (manual dibandingkan digital), serta pemahaman terhadap teknologi. Data-data ini diperiksa dengan menggunakan kerangka teori administrasi publik yang menekankan aspek akuntabilitas dan transparansi (Ghofar et al., 2021). Penekanan pada digitalisasi administrasi ini penting karena merupakan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi desa yang merata (Sinarwati et al., 2023). Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan bisa menjadi panduan praktis bagi BUMDes lainnya yang sedang dalam proses transisi manajemen serta berupaya meningkatkan profesionalisme administrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mendalami dan memahami peran administrasi dalam pengelolaan BUMDes secara mendalam dengan menggunakan data berupa narasi, bukan statistik. (Haryono, 2023) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfungsi untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh, di mana posisi peneliti sebagai alat utama sangat penting. Metode deskriptif bertujuan untuk menampilkan dengan sistematis fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat di lokasi penelitian. Pemilihan desain ini sangat sesuai dengan kompleksitas penelitian tata kelola BUMDes, karena memerlukan pemahaman kontekstual terhadap praktik administrasi yang meliputi aspek sumber daya manusia dan kendala teknologi.

Lokasi penelitian ditetapkan di BUMDes Tajung Berseri, Desa Tajungsari, Kabupaten Pati. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristiknya yang kompleks, karena BUMDes mengelola empat unit usaha aktif (penyewaan alat konstruksi, pengelolaan air bersih PAMSIMAS, sektor pariwisata, serta layanan WiFi desa) yang menimbulkan tantangan administratif yang lebih tinggi dibandingkan BUMDes pada umumnya. Meskipun unit-unit usaha tersebut berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), praktik administrasi yang berjalan masih menghadapi sejumlah kendala, sehingga lokasi ini dianggap relevan dan tepat untuk dianalisis.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling (pemilihan subjek secara sengaja) untuk memperoleh informasi yang mendalam dan kredibel. Penelitian ini melibatkan empat informan utama, yaitu Kepala Desa (berperan sebagai penasihat), Ketua BUMDes (pemimpin operasional), Sekretaris (bertanggung jawab atas administrasi dan dokumentasi), serta Bendahara

(bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pencatatan). Keempat informan ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam proses manajemen administrasi BUMDes, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Dengan demikian, mereka dapat memberikan informasi menyeluruh terkait tiga permasalahan utama, yaitu tantangan SDM, ketergantungan pada sistem manual, dan rendahnya pemahaman teknologi. Adapun siklus penelitian BUMDes ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Siklus penelitian BUMDes

Untuk memastikan keabsahan data (data trustworthiness), penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber data ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari para informan (wawancara) dengan hasil observasi di lapangan dan data dokumentasi (laporan BUMDes). Penggunaan teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas dan memverifikasi data yang ditemukan (Haryono, 2023), sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi empiris di Desa Tajung Sari.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model (Miles et al., 2014) yang merupakan teknik analisis interaktif yang relevan untuk data kualitatif. Model ini melibatkan tiga tahap utama yang dilakukan secara interaktif: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen administrasi memiliki peran krusial dalam mendukung pengelolaan dan akuntabilitas BUMDes Tajungsari, terutama terkait dengan fungsi pencatatan dan pelaporan. Administrasi keuangan dimulai dari pencatatan harian yang dilakukan oleh masing-masing unit usaha seperti wisata, WiFi desa, air bersih, dan persewaan alat bangunan, yang hingga kini masih dijalankan secara manual menggunakan buku kas harian serta spreadsheet sederhana. Data tersebut kemudian direkap setiap bulan oleh sekretaris dan bendahara, yang selanjutnya disusun menjadi laporan triwulan yang diserahkan kepada pemerintah desa beserta salinan untuk BPD. Ketua BUMDes, Ibu ketua BUMDes yaitu Ibu Yuli, menegaskan bahwa administrasi memiliki peranan yang sangat signifikan karena laporan keuangan menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu unit usaha memberikan keuntungan atau perlu dievaluasi. Dan menjelaskan bahwa “yang menjadi tolak ukur adalah laporan administrasinya, karena setiap tahun BUMDes harus memberikan laporan kepada pemerintah daerah dan melalui administrasi itulah kinerja unit usaha dapat dinilai”. Laporan ini bukan hanya berfungsi sebagai dasar evaluasi bagi pengurus, tetapi juga sebagai bahan pertanggungjawaban ketika dilakukan pemeriksaan dan pendampingan rutin dari DISPERADES.

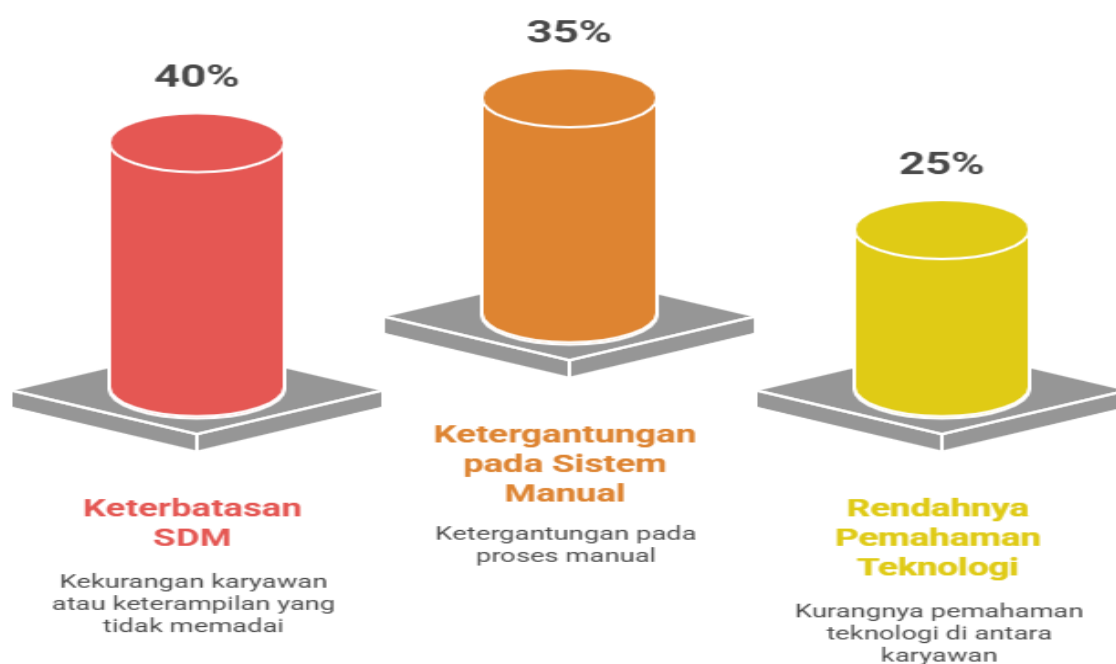
Fungsi administrasi ini sangat sesuai dengan konteks pengelolaan BUMDes yang memfokuskan perhatian pada pengoptimalan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pelaporan sebagai elemen kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Ketmoen et al., 2024). Sistem administrasi yang diterapkan bersifat berlapis: setiap unit usaha menyusun laporan harian dan bulanan, sedangkan pengurus harian menginput data tersebut ke dalam aplikasi pelaporan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Meskipun beberapa pengurus masih menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi digital karena perbedaan kapasitas SDM dan pengalaman teknologi, upaya pencatatan tetap berjalan secara konsisten. Hal ini selaras dengan pendapat kepala desa yang menyatakan bahwa administrasi keuangan sangat penting karena laporan harus diserahkan secara rutin sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian meskipun masih terdapat kendala pada aspek digitalisasi dan kompetensi SDM, sistem administrasi BUMDes Tajungsari telah berfungsi sebagai basis dalam pengambilan keputusan, alat untuk monitoring kinerja unit usaha, serta sarana pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawaran desa.

Selain menjalankan tanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, administrasi BUMDes Tajungsari juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan arsip yang berfungsi sebagai dasar untuk penyimpanan seluruh dokumen yang berhubungan dengan operasional organisasi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dokumen-dokumen seperti laporan keuangan bulanan dari tiap unit usaha, surat laporan triwulanan kepada pemerintahan desa, arsip anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta bukti transaksi usaha disimpan dan diarsipkan oleh sekretaris dan bendahara menggunakan sistem manual yang tersusun dalam map dan lemari di kantor BUMDes. Sekretaris BUMDes menjelaskan bahwa setiap unit usaha diwajibkan untuk menyerahkan laporan paling lambat tanggal 25 setiap bulan, agar bisa dicatat dan diarsipkan, serta semua dokumen ini akan menjadi bahan laporan triwulan kepada pemerintahan desa. Ia menyatakan bahwa “seluruh unit usaha

BUMDes setiap bulan menyusun laporan keuangan yang akan dicatat oleh sekretaris, dan laporan tersebut diarsipkan serta disampaikan secara berkala kepada pemerintah desa." Meskipun sistem digital belum sepenuhnya diterapkan, proses pengarsipan tetap berlangsung secara teratur dengan memisahkan dokumen berdasarkan unit usaha dan menyimpan surat-menyurat sesuai dengan ketentuan AD/ART. Praktik pengarsipan ini sangat penting untuk menjaga ingatan organisasi, memastikan integrasi legalitas, serta memudahkan proses audit dan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Senjani, 2019) yang menekankan betapa pentingnya sistem manajemen arsip yang terencana demi kelangsungan usaha BUMDes.

Secara keseluruhan, peran administrasi dalam pengelolaan BUMDes Tajungsari meliputi tiga fungsi utama: pencatatan keuangan harian oleh unit usaha, penyusunan laporan bulanan dan triwulanan oleh pengurus, serta penyimpanan dokumen operasional sebagai bagian dari sistem pengarsipan yang memelihara transparansi dan akuntabilitas. Meskipun sebagian besar proses administrasi masih dilakukan secara manual, hal ini telah berfungsi sebagai alat dalam pengambilan keputusan, sarana untuk menilai kinerja unit usaha, serta bukti akuntabilitas BUMDes kepada pemerintah desa, dinas terkait, dan masyarakat. Dengan cara ini, administrasi berperan sebagai kerangka yang memastikan kelangsungan operasional BUMDes Tajungsari dan juga mendukung pengelolaan yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip pengelolaan BUMDes yang baik.

Meskipun sistem administrasi telah berfungsi sebagai landasan akuntabilitas, BUMDes Tajungsari menghadapi tiga kendala krusial yang menghambat efisiensi operasional dan potensi pertumbuhan unit usaha, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), ketergantungan pada sistem manual, dan rendahnya pemahaman teknologi digital. Adapun kendala-kedala yang dihadapi BUMDes dapat dijabarkan pada gambar 2.



Gambar 2. Kendala yang dihadapi BUMDes

Keterbatasan SDM menjadi kendala yang signifikan karena sebagian pengurus tidak menjadikan pengelolaan BUMDes sebagai pekerjaan utama, sehingga perhatian mereka terbagi dengan pekerjaan lain. Ketua BUMDes menjelaskan bahwa komitmen waktu lebih penting dibandingkan kemampuan teknis dengan menyatakan bahwa *“yang diutamakan itu yang sanggup jadi pengurus dulu dan benar-benar siap waktunya hanya untuk BUMDes; kalau dia pintar tapi tidak ada waktu, itu tetap sulit.”* Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian (Rosari et al., 2022) yang menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan sumber daya manusia merupakan rintangan utama dalam manajemen BUMDes. Oleh sebab itu, peningkatan Pengendalian Internal dan komitmen profesional menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes (Arsyad, 2025).

Selain permasalahan di bidang SDM, ketergantungan pada sistem administrasi manual juga menjadi kendala yang mengganggu efektivitas pengelolaan. Proses pencatatan yang masih menggunakan buku kas dan spreadsheet sederhana menciptakan proses konsolidasi data yang memakan waktu lama dan berisiko tinggi terhadap kehilangan dokumen. Kepala Desa mengungkapkan bahwa *“karena masih manual, berkas itu bisa rusak atau hilang, tapi laporan tetap harus dibuat secara berkala.”* Situasi ini sejalan dengan analisis (Indahwati et al., 2024) yang menyatakan bahwa penerapan sistem manual rentan terhadap ketidaktepatan laporan dan dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, sistem manual juga meningkatkan risiko kurangnya transparansi, karena proses verifikasi dan penelusuran data menjadi lebih lambat. Dalam konteks tata kelola yang modern, digitalisasi administrasi menjadi syarat penting untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Harahap et al., 2023). Akan tetapi, transformasi digital tidaklah mudah, mengingat keterbatasan pengetahuan digital di antara pengurus. Ketua BUMDes mengakui bahwa *“tidak semua pengurus mengerti aplikasi dari dinas, jadi harus belajar, suka atau tidak.”* Tantangan terkait SDM dan masalah teknologi tersebut adalah kendala umum yang sering dihadapi oleh BUMDes dan menjadi faktor penghambat utama dalam upaya untuk melakukan digitalisasi administratif (Wulandari & Lestari, 2024)

Untuk mengatasi tantangan dalam SDM, sistem manual, dan hambatan teknis, BUMDes Tajungsari telah melakukan langkah-langkah yang proaktif dengan menjalin kerjasama eksternal dan menyusun rencana strategis di dalam organisasi. Upaya peningkatan mutu administrasi diwujudkan dalam tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, pengembangan kemampuan, dan perencanaan digitalisasi untuk jangka panjang.

Pertama, Kolaborasi dan Pendampingan. Para pengurus secara aktif melakukan koordinasi dengan DISPERMADES Kabupaten Pati serta memanfaatkan pendampingan dari pemerintah desa sebagai upaya memperkuat pengelolaan. Sekretaris BUMDes mengungkapkan bahwa pengurus *“senantiasa berkoordinasi dengan DISPERMADES mengenai pengembangan kemampuan personel BUMDes serta melakukan studi banding.”* Upaya ini sesuai dengan (Satria et al., 2024) yang menekankan bahwa kolaborasi antar lembaga adalah pendekatan yang krusial dalam meningkatkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa. Selain itu, kegiatan studi banding yang dilakukan ke BUMDes lain dengan tata kelola yang lebih bagus memberikan pembelajaran berbasis pengalaman langsung yang sangat efektif dalam mengatasi masalah teknis dan pengelolaan (Aprillianto et al., 2022).

Kedua, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Pengurus BUMDes telah mengikuti pelatihan dasar terkait administrasi keuangan yang diadakan oleh pemerintah kabupaten serta pendamping desa. Langkah ini dianggap penting, karena mengingat banyak pengurus sebelumnya tidak memiliki pengalaman formal dalam administrasi. Pelatihan tambahan direncanakan di masa mendatang dengan fokus pada penguasaan teknologi digital dan aplikasi untuk pelaporan. Pengembangan kapasitas ini menjadi kebutuhan mendesak, sebab peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes hanya bisa dicapai melalui perbaikan sistem akuntansi dan peningkatan kemampuan pengelola (Lestari et al., 2025).

Ketiga, Perencanaan Digitalisasi Administrasi. Sebagai solusi jangka panjang, BUMDes Tajungsari telah merumuskan rencana digitalisasi untuk mempercepat dan memperlancar proses pelaporan. Ketua BUMDes menyampaikan bahwa *"kami sedang mencari aplikasi yang sederhana agar proses pencatatan dan pelaporan lebih cepat, transparan, dan tidak berisiko hilang."* Rencana ini merupakan langkah strategis yang sesuai dengan kebutuhan zaman, karena transformasi digital adalah dasar yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas unit usaha desa (Sulistyowati et al., 2025).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar data bergantung pada hasil wawancara, mengingat dokumen administratif BUMDes masih dikelola secara manual dan tidak semua arsip dapat diakses. Situasi ini memungkinkan munculnya bias dari sudut pandang informan. Kedua, penelitian ini menggunakan satu lokasi, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Ketiga, observasi hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga dinamika administratif yang bersifat musiman tidak sepenuhnya teramati. Keterbatasan tersebut penting dicatat agar penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dan memverifikasi temuan dengan pendekatan triangulasi yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi memainkan peranan penting dalam manajemen BUMDes di Desa Tajungsari. Administrasi mendukung pencatatan transaksi, pembuatan laporan, dan pengambilan keputusan manajerial. Masalah utama yang dihadapi meliputi penggunaan sistem manual yang masih ada, kekurangan sumber daya manusia, dan tantangan dalam beradaptasi dengan aplikasi digital.

Untuk meningkatkan kualitas administrasi, BUMDes Tajungsari telah melakukan upaya seperti melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengambil bagian dalam studi banding, dan merencanakan penerapan administrasi yang berbasis digital. Namun, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan tetap menjadi perhatian utama agar manajemen administrasi dapat lebih profesional, jelas, dan berkelanjutan.

REKOMENDASI

Implikasi Teoritis dan Keterbatasan Penelitian

Bagian ini memuat implikasi teoritis serta keterbatasan dari penelitian yang bisa menjadi dasar untuk pengembangan studi selanjutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup data kualitatif yang terfokus pada satu BUMDes, sehingga temuan tidak bisa diterapkan secara luas. Di samping itu, kurangnya dokumentasi

resmi dan penggunaan sistem administrasi yang masih manual mengakibatkan sebagian informasi bergantung pada wawancara, yang mungkin dipengaruhi oleh pandangan subjektif dari narasumber. Situasi ini adalah tantangan metodologis yang perlu diwaspadai saat menganalisis hasil penelitian.

Dari sudut pandang teoritis, disarankan agar penelitian mendatang memperluas cakupan pada beberapa BUMDes di wilayah berbeda serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif agar efektivitas administrasi dapat diukur dengan lebih objektif. Penelitian selanjutnya juga bisa meneliti pengaruh digitalisasi terhadap kinerja unit usaha BUMDes atau mengkaji model tata kelola yang paling efektif diterapkan di desa-desa dengan karakteristik yang berbeda.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Bagian ini menyajikan saran praktis yang secara langsung ditujukan kepada BUMDes Tajungsari serta rekomendasi kebijakan untuk lembaga terkait. Dalam hal praktis, BUMDes Tajungsari harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan menyediakan pelatihan di bidang administrasi, akuntansi dasar, dan literasi digital yang berkelanjutan. Program pelatihan untuk SDM juga perlu dirancang berbasis kebutuhan (*training needs analysis*), sehingga materi yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan awal pengurus. Proses digitalisasi administrasi sebaiknya diterapkan secara bertahap, dimulai dari penggunaan aplikasi sederhana untuk pencatatan dan pengarsipan. Selain itu, BUMDes Tajungsari perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi secara tertulis, yang mencakup langkah-langkah pencatatan, pelaporan, pengarsipan, dan penggunaan aplikasi digital demi menjamin konsistensi dalam pelaksanaan kerja.

Dalam konteks Kebijakan, kolaborasi dengan DISPERMADES perlu dioptimalkan untuk mendorong standarisasi aplikasi akuntansi sederhana yang bisa dipakai oleh BUMDes lainnya, sehingga mencapai aspek skalabilitas digitalisasi di tingkat wilayah, bukan hanya di tingkat desa. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya intervensi kebijakan yang lebih terstruktur dari pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kualitas manajemen BUMDes.

REFERENSI

- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Bumdes (Studi kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62-72.
- Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., Irmadariyani, R., Purnamawati, I. I., & Sulistiyo, A. B. (2022). Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 3(2), 55-60.
- Arsyad, R. M. (2025). *Pengaruh Whistleblowing System, Pengendalian Internal dan Good Governance Terhadap Pencegahan Tindak Korupsi dengan Komitmen Profesional dan Komitmen Independensi Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Islam Indonesia.
- Ayu, M., Sari, D., Hasanah, S. U., & Utami, D. P. (2022). Pencatatan Transaksi Akuntansi Dalam Penjualan Tiket Melalui Pembinaan Wisata Teluk Bayur Bird Park. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 3(01), 39-44.
- Fatimah, A. S. (2021). Pengembangan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Cilumba Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 2(1), 40-62.

- Ghofar, A., Pangestuti, E., Wulandari, P. P., Subandi, H., & Kusumadewi, A. W. (2021). STRENGTHENING THE GOVERNANCE OF VILLAGE-Owned Business Entity (BUMDes) for Sociopreneurship Encouragement. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 29(3), 212–218.
- Harahap, R., Lubis, F. A., & Harahap, R. D. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 199–207.
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2).
- Hirman, A. A., Sukirman, A. S., Bangun, A. F., & Ramadhonah, I. S. (2023). Penerapan Good BUMDes Governance. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 16–21.
- Indahwati, R., Lubis, A. S., & Harahap, J. P. R. (2024). *Manajemen keuangan: badan usaha milik desa/desa bersama (Bumdes/Bumdesma)*. Merdeka Kreasi Group.
- Ketmoen, A., Leki, S., Lawalu, E. M., Indrawati, A. S., Pongge, M. I., & Lado, F. A. K. (2024). Revitalisasi manajemen badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(3), 595–606.
<https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i3.22190>
- Lestari, S. A., Ismatullah, I., & Eriswanto, E. (2025). Analisis Sistem Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Purwa Binangkit (Studi Kasus pada Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook. (No Title)*.
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan BUMDes di era digitalisasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3040–3049.
- Safitri, A. F., Pramono, J., & Sugiyarti, S. R. (2023). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Solidaritas: Jurnal Ilmu Sosial*, VOL 7 NO 2.
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/download/9752/5350>
- Satria, R., Islam, N., & Sari, T. M. (2024). Optimalisasi Peran Bumdes dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Tiyuh Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 6(2), 133–151.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen pada BUMDES dalam the Role of Management System in Bumdes in Increasing the Real Income of the Village. *Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAD*, 2(1), 2.
<https://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/article/download/23698/pdf>
- Sinarwati, N. K., Sujana, E., Kertiasih, N. K., & Al Insani, I. (2023). Digitalisasi badan usaha milik desa dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa merata. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS*, 2(1), 548–556.
- Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan perannya terhadap kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 325–359.

- Sulistiyowati, R., Artanti, Y., Utami, D. A., Ramadhani, Y. C., Suharyoto, S., Waro'Panotogomo, A., Hidayat, N. R., Hartono, P. G., Saputro, D., & Evendy, A. (2025). Transformasi Digital Dan Inovasi Dalam Bisnis Manajemen. *Penerbit Tahta Media*.
- Tri Widyawati Rahayuningsih, Irawaty Igrisa, & Ismet Sulila. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 1-5.
- Wardana, W., Fitrianna, H., & Suhartanto, S. (2022). Scale Up Business dan Digitalisasi Tata Kelola BUMDes Retno Sembodo dalam Membentuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 3(2), 178-189.
- Wulandari, G. P. M., & Lestari, N. P. N. E. (2024). Transformasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Era Digital. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 263-281.
- Yuliani, R., Binti, R. E., Limarjani, S., Misra, A., Hardy, E., Sari, N. A., & Yasin, M. (2021). Digitalisasi Laporan Keuangan BUMDes Kayu Bawang. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 1(1), 47-58.